

Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Di Sulawesi Utara

Abdul Halim, Endra Wijaya, Khiyarunnas
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

Abstract

This study use monthly data for period 2009.01-2021.12. The data analyzed by using OLS. Variables to be studied are: government expenditure, capital expenditure, employees expenditure, goods expenditure, BI Rate, price of BBM, rice price, and exchange rate. The results show that government expenditure, employees expenditure, goods expenditure, price of BBM, exchange rate, and rice price have positive and significant influences on inflation in Indonesia, while capital expenditure, BI Rate have negative and significant influences on inflation therefore the author suggests to increase capital expenditure especially for infrastructure.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan data bulanan antara 2009.01-2021.12. Data dianalisis dengan menggunakan OLS. Variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah, belanja modal, belanja pegawai, belanja barang, BI Rate, harga BBM, harga beras, dan nilai tukar. Hasil studi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, belanja pegawai, belanja barang, harga BBM, harga beras, dan nilai tukar secara signifikan dan positif mempengaruhi inflasi di Indonesia, sedangkan belanja modal dan BI Rate berpengaruh signifikan dan negatif terhadap inflasi, sehingga peneliti menyarankan untuk meningkatkan belanja modal khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

Keywords: Inflation, Government Expenditure, ordinary least square

JEL Classification: C13, E62, H61.

PENDAHULUAN

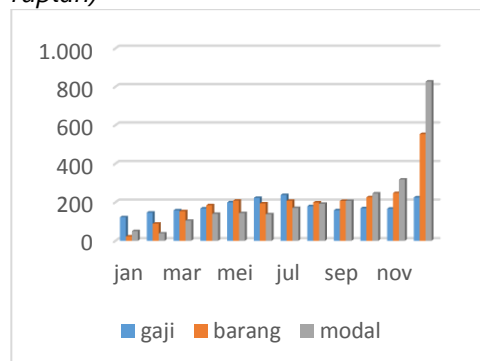
Inflasi merupakan dilema yang menghantui perekonomian setiap negara. Inflasi yang moderate dan stabil merupakan insentif bagi produsen untuk tetap memproduksi dan meningkatkan produksi. Inflasi yang tinggi menjadi hambatan untuk mendapatkan target pertumbuhan ekonomi. Banyak kajian membahas inflasi, tidak hanya cakupan regional, nasional, namun juga internasional. Inflasi cenderung lebih tinggi pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia dengan struktur perekonomian bercorak agraris. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan inflasi pada perekonomian (Baasir, 2003:265).

Menurut Global Competitiveness Report 2014-2015, negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 0.5 sampai 2.9 persen per tahun. Ketika inflasi tinggi, tingkat harga di masa depan sangat tidak menentu sehingga keuntungan pengusaha sulit diprediksi dan proyek jangka panjang menjadi lebih beresiko, mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Deflasi atau inflasi yang hampir nol juga berdampak negatif terhadap perekonomian karena hal tersebut meningkatkan nilai riil atas hutang, karena gaji tetap berada di atas tingkat harga pasar, maka akan mengurangi investasi dengan meningkatkan suku bunga riil dan dapat mendorong konsumen untuk menahan konsumsinya karena adanya ekspektasi bahwa harga di masa mendatang akan cenderung turun.

Untuk berbagai alasan tersebut, sebagian besar Bank Central menargetkan inflasi yang moderate dan stabil. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Jepang yang dikenal dengan kebijakan abenomic nya terus berupaya agar Jepang tidak semakin terjebak dalam deflasi yang berkepanjangan. Salah satu penyebab inflasi adalah karena faktor pengeluaran pemerintah (G) yang tercantum dalam APBN.

Lambannya penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran bukanlah disebabkan oleh uang kas pemerintah yang tidak mencukupi akibat masih rendahnya realisasi penerimaan negara. Kondisi yang terjadi adalah pemerintah memiliki uang kas (idle cash) yang cukup besar meskipun sebagian besar berasal dari pinjaman. Dalam kondisi kas dalam keadaan minus pemerintah akan menggunakan dana talangan yang berasal dari SAL (Sisa Anggaran Lebih) dengan catatan bahwa dana talangan tersebut harus segera dikembalikan ke rekening SAL secepatnya ketika kondisi kas telah mencukupi.

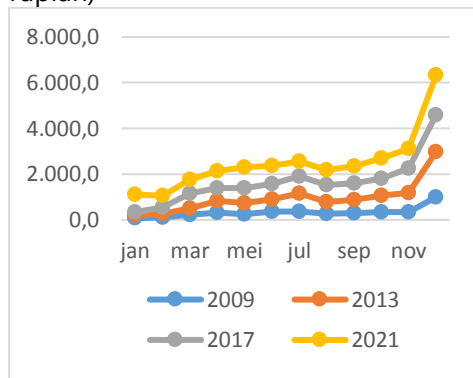
Grafik 1: *Rata-Rata Realisasi Bulanan Per Jenis Belanja 2009 - 2021 (miliar rupiah)*



Sumber: Aplikasi MEBE diolah dengan excel

Jika di *breakdown* per jenis belanja, terlihat bahwa penyumbang utama tidak meratanya realisasi belanja APBN lingkup Sulawesi Utara berasal dari belanja modal. Pergerakan realisasi belanja barang juga tidak merata namun tidak setimpang belanja modal. Realisasi belanja pegawai relatif lebih merata sepanjang tahun kecuali pada bulan Juli yang naik sekitar dua kali dari rata-rata bulanan dikarenakan adanya pembayaran gaji ke-13.

Grafik 2. Tren Realisasi Bulanan (miliar rupiah)



Sumber: Aplikasi MEBE diolah dengan excel
Selama kurun waktu 2009 - 2021, belanja kementerian negara/lembaga telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang hampir sama persis dimana sangat rendah di bulan Januari dan Februari kemudian perlahan lahan meningkat hingga bulan Juli selanjutnya sedikit mengalami kontraksi pada bulan Agustus kemudian terus mengalami peningkatan hingga melonjak tajam pada bulan November dan Desember. Pola demikian juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada pemerintah pusat. Apabila kondisi tersebut masih terus berlanjut, hal ini akan mengganggu rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum, dan

tentunya berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada bulan Desember.

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola penyerapan APBN lingkup Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui kemiripan indeks musiman antara pengeluaran Pemerintah dengan inflasi.
3. Untuk mengukur dampak realisasi pengeluaran Pemerintah Pusat yang tercantum dalam APBN terhadap tingkat inflasi.
4. Untuk mengukur dampak realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap inflasi.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Inflasi

Menurut Lerner (Gunawan, 1995), inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Sedangkan menurut Sukirno (1998), inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. Sementara itu Mankiw (2006) menyatakan bahwa inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Hampir semua negara, menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil adalah tugas bank sentral. Secara umum inflasi berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Cost Push Inflation*

Inflasi ini disebabkan oleh sisi penawaran di pasar. Hal ini dapat terjadi antara lain karena kenaikan biaya produksi dan bahan baku dan negative supply shock yang terjadi antara lain

akibat bencana alam dan terganggunya proses distribusi.

b. Demand Pull Inflation

Inflasi ini biasa terjadi pada masa perekonomian yang tumbuh dengan cepat. Adanya kesempatan kerja yang tinggi menimbulkan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menyebabkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Dalam makro ekonomi inflasi ini digambarkan dengan output riil yang melebihi output potensial, atau permintaan total, atau permintaan agregat lebih besar daripada kapasitas perekonomian.

c. Expected Inflation

Inflasi ekspektasi terjadi akibat adanya perilaku masyarakat secara umum yang bersifat forward looking/ekspektasi terhadap apa yang akan terjadi. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa di masa yang akan datang kondisi ekonomi menjadi semakin baik dari masa sebelumnya. Harapan masyarakat ini dapat menyebabkan terjadinya demand pull inflation maupun cost push inflation. Hal ini tergantung pada harapan masyarakat yang mana yang akan lebih baik dan bagaimana kondisi persediaan barang dan faktor produksi saat itu dan masa datang.

Aggregate Demand Dan Aggregate Supply

Kurva aggregate supply jangka panjang (LRAS) menggambarkan hubungan jangka panjang antara tingkat harga dan kuantitas dari GDP riil yang ditawarkan. Dalam jangka panjang, tingkat harga tidak akan merubah kurva AS sehingga kurva AS jangka panjang akan berbentuk garis

vertikal yang berada pada tingkat potensial dari GDP riil. Dari tahun ke tahun kurva LRAS akan bergeser ke kanan sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, akumulasi modal baik mesin dan gedung, serta adanya kemajuan teknologi.

Kurva AS jangka pendek (SRAS) memiliki upward sloping karena dua hal yaitu : pertama, penyesuaian harga input lebih lambat dibandingkan dengan harga barang akhir. Keinginan memperoleh laba yang tinggi akan membuat perusahaan memproduksi lebih banyak. Kedua, beberapa perusahaan menyesuaikan harganya lebih lambat dibandingkan perusahaan lainnya, sehingga mereka berpikir bahwa penjualannya meningkat dan mereka meningkatkan produksinya.

Variabel-variabel yang dapat menggeser kurva LRAS yaitu:

- a. Peningkatan modal serta jumlah tenaga kerja,
- b. Perubahan teknologi, dan
- c. Ekspektasi terhadap perubahan tingkat harga pada masa mendatang.

Kurva AD menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan kuantitas dari GDP riil yang diminta, dengan asumsi ceteris paribus. Variabel-variabel yang menyebabkan kurva AD bergeser dikategorikan dalam tiga kelompok yakni:

- a. Perubahan kebijakan Pemerintah
Kebijakan Moneter: yakni tindakan Bank Sentral untuk mengendalikan money supply dan tingkat bunga untuk mengejar sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi. Misalkan, Bank Indonesia menaikkan BI rate karena inflasi cukup tinggi sehingga uang

beredar bergeser berkurang dan kurva AD bergeser ke kiri.

Kebijakan Fiskal: perubahan dalam belanja ataupun pendapatan (perpajakan) untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi. Dalam jangka panjang, kebijakan fiskal akan mempengaruhi saving, investment, dan growth. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal utamanya digunakan untuk mempengaruhi aggregate demand. Contoh, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pemerintah meningkatkan pengeluaran (G), sehingga berdampak pada pergeseran kurva AD ke kanan.

b. Perubahan ekspektasi rumah tangga dan perusahaan

Jika rumah tangga optimis bahwa pendapatan di masa mendatang akan naik, maka rumah tangga akan meningkatkan konsumsi. Begitu juga dengan perusahaan, jika mereka optimis dengan masa mendatang, maka perusahaan juga akan meningkatkan pengeluaran untuk memproduksi lebih banyak lagi sehingga kurva AD bergeser ke kanan.

c. Perubahan dari variabel-variabel luar negeri

Apresiasi mata uang dalam negeri akan menyebabkan harga barang dalam negeri menjadi relatif lebih mahal dan berdampak pada turunnya ekspor, dan sebaliknya impor akan meningkat karena harga barang luar negeri menjadi relatif lebih murah sehingga berdampak menurunnya net ekspor dan kurva AD bergeser ke kiri.

Peningkatan pengeluaran pemerintah (G) sebagai bagian dari agregate demand tentunya akan menggeser kurva AD ke kanan, sehingga akan berdampak pada kenaikan harga atau inflasi. Terdapat dua dampak

makroekonomi dari perubahan pengeluaran pemerintah (G) yakni:

- a. *multiplier effect*, terjadi jika tiap satu rupiah yang dikeluarkan pemerintah mampu meningkatkan permintaan atas barang dan jasa (aggregate demand) lebih dari satu rupiah.
- b. *crowding-out effect*, yaitu jika peningkatan pengeluaran pemerintah (G) menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga sehingga berdampak pada berkurangnya pengeluaran untuk investasi.

Konsep Pengeluaran Pemerintah

Kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan adalah merupakan cerminan dari pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2001). Menurut Samuelson dan Nordhaus (1996), pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos yaitu:

1. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dimana gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Yaitu pemberian atau pembayaran langsung kepada masyarakat, seperti subsidi, bantuan langsung, pembayaran pensiun dan lain-lain.

Penyerapan Pemerintah	Anggaran	Belanja
----------------------------------	-----------------	----------------

Menurut Yustika (2012), terdapat beberapa aspek yang mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun, yaitu:

1. Setiap kementerian dan lembaga terlebih dahulu melakukan penelaahan atas perencanaan terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBN.
2. Adanya proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan program.
3. Terdapat beberapa jenis program/proyek tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Kondisi yang menunjukkan kemampuan kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran yang ideal salah satunya tercermin pada penyerapan anggaran yang dilakukan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan dilakukan secara proporsional sesuai dengan target/pola ideal.

Penyerapan anggaran yang tepat sangat erat kaitannya dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. Dalam pelaksanaan APBN, proses

penyerapan anggaran merupakan proses di mana kegiatan-kegiatan yang telah dirinci dalam DIPA masing-masing satuan kerja dilaksanakan kemudian pembayarannya dilaksanakan kepada pihak yang berhak sehingga menyebabkan terjadinya pengeluaran negara. Pembayaran terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dirinci dalam DIPA satuan kerja tersebut harus terlebih dahulu dituangkan dalam rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. Proses penyusunan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA ini bahkan harus dilakukan sebelum proses penyerapan anggaran terjadi dan dilakukan sebelum penetapan DIPA sehingga pada saat DIPA ditetapkan maka di dalam DIPA yang ditetapkan tersebut telah tercantum rencana penarikan dana yang akan dilakukan oleh satuan kerja setiap bulan yang dirinci sampai dengan level per jenis belanja. Penyerapan anggaran yang tepat dan sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum pada halaman III DIPA menunjukkan kematangan satuan kerja dalam proses perencanaan sekaligus pelaksanaan anggaran.

Penyerapan anggaran pada satuan kerja seharusnya terjadi secara proporsional sesuai dengan target/pola ideal yang terjadi sepanjang tahun dan tidak seharusnya menumpuk pada periode tertentu saja misalnya seperti pada saat akhir tahun anggaran. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan bahwa target penyerapan anggaran untuk setiap triwulan adalah sebesar 15% untuk triwulan I, 40% untuk

triwulan II, 60% untuk triwulan III dan 90% untuk triwulan IV. Pada kenyataannya seringkali target realisasi pada triwulan I, II dan III tidak tercapai karena berbagai alasan sehingga menyebabkan terjadinya penumpukkan realisasi pada triwulan IV. Hal ini menunjukkan suatu kondisi yang sangat tidak proporsional. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa salah satu fungsi APBN yaitu fungsi alokasi dimana anggaran negara diarahkan untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam sumber daya, mengurangi jumlah pengangguran dan daya guna perekonomian melalui pengadaan berbagai sarana dan prasarana yang dapat segera dinikmati oleh masyarakat menjadi tidak maksimal. Penyerapan anggaran yang rendah, tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun anggaran menunjukkan pelaksanaan anggaran satuan kerja yang tidak optimal dan tidak berkualitas.

Studi Terdahulu

Aghevi (1978) dalam jurnal *"Government Deficits and the Inflationary Process in Developing Countries"* dengan tujuan utama menguji hubungan antara peningkatan *money supply* dan *inflasi* pada empat negara berkembang yakni : Brasil, Kolombia, Republik Dominika, dan Thailand yang dianggap memiliki inflasi cukup tinggi. Model yang digunakan adalah three-stage least squares (3SLS). Variabel terdiri dari *domestic price level*, *nominal government expenditures*, *nominal government revenues*, *stock of money*, dan *expected rate of inflation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah akan diiringi dengan

inflasi, pendapatan Negara akan cenderung turun seiring dengan makin banyaknya utang, selanjutnya utang tersebut akan menambah defisit dan menyebabkan naiknya *money supply* dan pada akhirnya akan meningkatkan inflasi lebih jauh lagi.

Habibullah (2011), dalam jurnal *"Budget Deficits and Inflation in Thirteen Asian Developing Countries"* yang bertujuan untuk menganalisis hubungan jangka panjang antara fiscal defisit dan tingkat inflasi pada 13 negara berkembang, mengungkapkan bahwa tingginya inflasi pada negara berkembang diduga berkaitan erat dengan kebijakan fiscal deficit. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa variabel variabel (*budget deficits*, *money supply* and *inflation*) saling terkait satu sama lain, dan terdapat hubungan dalam jangka Panjang yang signifikan antara fiscal defisit dan tingkat inflasi, dan rekomendasinya adalah pemerintah harus mengurangi defisit dan Bank Sentral harus lebih independent agar lebih leluasa mengendalikan inflasi. Surjaningsih, dkk (2012), dalam Bulletin of Monetary Economics and Banking yang berjudul *"The Impact of Fiscal Policy on The Output and Inflation"* bertujuan untuk Menganalisis dampak *fiscal policy* terhadap output & inflasi, serta dampak dari discretionary fiscal policy atas output and volatilitas inflasi mengungkapkan bahwa *fiscal policy* di Indonesian cenderung *cyclical* secara agregat atau *procyclical* jika expenditures dikelompokkan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi seperti equilibrium

jangka panjang inflasi yang tinggi. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa spending untuk infrastruktur memiliki dampak yang lebih baik terhadap kenaikan inflasi dibanding spending untuk pengeluaran rutin, pengenaan pajak yang berlebihan akan berdampak pada kenaikan inflasi. Rekomendasi penelitian tersebut adalah agar penyerapan anggaran harus sinkron dengan perencanaan baik dari sisi jumlah dan waktu, taxation yang melebihi target harus dikaji untuk menghindari distorsi.

Nguyen (2014), dalam jurnal yang berjudul "*Impact of government spending on inflation in Asian emerging economies: evidence from India, Vietnam, and Indonesia*" mengungkapkan jika *hyper-inflation* dan *high inflation* pada 94 negara periode 1960-1995 dimana hiperinflasi memiliki dampak negatif terhadap output, *growth*. Ketiga negara (obyek) termasuk *Middle Income Trap*. Hasil dari penelitian yang bertujuan untuk menganalisis government spending dan menguji sejauh mana *government variable* dapat menyebabkan inflasi tersebut adalah terdapat *long-run causal relationship* antara *government spending* dan inflasi pada ketiga negara. juga, terdapat *short-run dynamics* antara kedua variabel, yang memastikan bahwa kapanpun inflasi terdeviasi dari level equilibrium jangka panjang, akan ada *adjustment* untuk kembali ke level equilibrium. Rekomendasinya adalah government spending yang lebih pruden jika Asian emerging market economies seperti Vietnam, India, dan Indonesia

ingin memperoleh *economic growth* yang berkesinambungan.

Sembiring (2010), dalam tesis yang berjudul "Bauran kebijakan fiskal moneter di Indonesia periode 1997q3 – 2009q4" dalam salah satu analisisnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap inflasi. Dalam simulasinya menunjukkan bahwa kebijakan ekspansi fiskal dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 10 persen akan berdampak pada kenaikan inflasi sebesar 2,37%.

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data sekunder bulanan periode tahun 2009-2021 yaitu: data inflasi Sulawesi Utara, belanja APBN Sulawesi Utara, nilai tukar, BI rate, harga BBM, dan rata-rata harga beras di Sulawesi Utara. Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari publikasi oleh BPS, BI, Direktorat Jenderal Anggaran, Aplikasi MEBE serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersifat time series. Periode waktu dari penelitian ini adalah dari bulan Januari 2009 hingga Desember 2021. Variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: inflasi, pengeluaran pemerintah, nilai tukar rupiah terhadap USD, BI rate, harga BBM, dan harga beras.

Dekomposisi Time Series

Dekomposisi dalam peramalan merupakan metode yang menggunakan empat komponen utama dalam meramalkan nilai masa

depan, komponen tersebut antara lain trend (Tt), musiman (St), Siklik/siklus (Ct) dan Error atau komponen ketidakteraturan (Et). Dalam penelitian ini dekomposisi dilakukan terhadap variabel Inflasi dan Government Expenditure dengan tujuan untuk mendapatkan pola musiman dan index musiman kedua variabel tersebut.

Ordinary Least Square (OLS)

Ordinary Least Squares (OLS) adalah metode estimasi paling umum untuk model linier. Model ini memiliki hasil estimasi terbaik selama memenuhi asumsi OLS untuk regresi linier. Alasan pemilihan metode OLS karena sesuai dengan teorema Gauss-Markov yang menyatakan bahwa OLS menghasilkan estimasi yang lebih baik daripada estimasi dari semua metode estimasi model linier lainnya ketika asumsi klasik terpenuhi.

Rumusan Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Belanja APBN lingkup Sulawesi utara secara keseluruhan berdampak signifikan dan positif terhadap inflasi. Belanja pemerintah selama ini lebih banyak bersifat administratif dan konsumtif sehingga dapat menyebabkan inflasi (demand pull inflation).
2. Belanja pegawai dan belanja barang berdampak signifikan dan positif terhadap inflasi, sedangkan belanja modal memiliki dampak signifikan dan negatif terhadap inflasi.

Spesifikasi Model

Hubungan antara variabel tingkat inflasi dengan government expenditure, nilai tukar, tingkat bunga (BI Rate), harga BBM, tarif TDL, dan harga gabah yang akan dijadikan model dalam

penelitian ini merupakan pengembangan model penelitian dari Sembiring (2010), namun peneliti menambahkan variabel harga BBM, dan harga gabah, serta membedakan dampak dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap inflasi. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$IHK = f(G, GAJI, BARANG, MODAL, BBM, R, KURS, TDL, GABAH)$

Persamaan regresinya adalah:

$\text{Log}(IHK) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(G_KL) + \beta_2 \text{Log}(R) + \beta_3 \text{Log}(BBM) + \beta_4 \text{Log}(KURS) + \beta_5 \text{Log}(GABAH) + \varepsilon$

$\text{Log}(IHK) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(GAJI) + \beta_2 \text{Log}(BARANG) + \beta_3 \text{Log}(MODAL) + \beta_4 \text{Log}(R) + \beta_5 \text{Log}(BBM) + \beta_6 \text{Log}(KURS) + \beta_7 \text{Log}(BERAS) + \varepsilon$

Dimana

Variabel Utama:

IHK = Index Harga Konsumen dalam index

G = Government Expenditure dalam miliar rupiah

$GAJI$ = belanja pegawai dalam miliar rupiah

$BARANG$ = belanja barang dalam miliar rupiah

$MODAL$ = belanja modal dalam miliar rupiah

Variabel control:

R = BI Rate dalam persen (%)

BBM = harga BBM untuk jenis premium dalam rupiah,

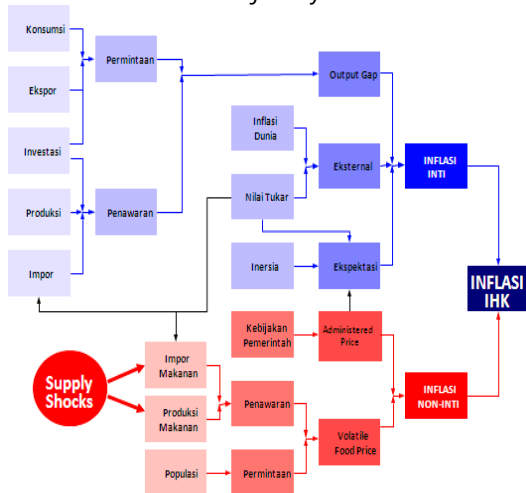
$KURS$ = nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dalam rupiah

$GABAH$ = rata-rata harga gabah kering dalam rupiah

Model yang digunakan adalah bentuk log - log dengan tujuan standarisasi karena masing-masing variabel memiliki satuan yang berbeda-beda. Selain itu, penggunaan model log -

log akan memudahkan cara baca hasil regresi (elastisitas). Pemilihan variabel telah disesuaikan dengan tujuan penelitian tentang dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap inflasi, sedangkan variabel jenis belanja (gaji, barang, dan modal) dipilih karena masing-masing jenis belanja tersebut diyakini memiliki dampak yang berbeda terhadap inflasi.

Gambar 1. Proses terjadinya inflasi



Sumber: www.bi.go.id

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga mewakili berbagai sumber penyebab inflasi sebagaimana tercermin pada Gambar 3, dimana untuk inflasi inti digunakan variabel nilai tukar, administered price diwakili oleh variabel harga BBM, sedangkan untuk mewakili volatile food price digunakan variabel harga gabah.

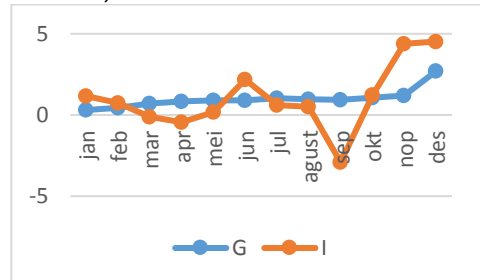
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Dekomposisi Time Series

Dalam penelitian ini dilakukan dekomposisi untuk mengetahui indeks musiman inflasi dan pengeluaran pemerintah serta melihat adanya

kemiripan pergerakan musiman antara kedua variabel tersebut.

Grafik 3. Dekomposisi Government Expenditure & Inflasi Bulanan (2009.01 – 2021.12)



Sumber: MEBE dan BPS, diolah

Dari hasil dekomposisi variabel inflasi (I) dan variabel G (*Government Expenditure*) dapat dilihat beberapa kemiripan indeks musiman pada kedua variabel dimana relative moderat pada bulan Februari, Juli, Agustus, dan Oktober kemudian melonjak tajam dan mencapai puncaknya pada bulan November hingga Desember. Selama 13 tahun ini puncak tertinggi belanja APBN terjadi pada bulan Desember dimana hampir semua instansi pemerintah berpacu untuk menghabiskan sisa anggaran (meningkatkan penyerapan anggaran) sehingga pengeluaran pemerintah sangat tinggi dimana indeks musiman mencapai 2.7 atau 8,85 kali dari belanja APBN di bulan Januari yang memiliki indeks musiman terendah.

Tabel 1. Koefisien Korelasi Variabel G dan IHK

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample	Sheet	Stats	Spec
Correlation									
		G_KL		IHK					
G_KL		1.000000		0.517481					
IHK		0.517481		1.000000					

Sumber: output eviws

Dengan melihat beberapa kemiripan pola musiman antara variabel G dan Inflasi serta besarnya nilai koefisien korelasi antara kedua variabel maka peneliti memiliki hipotesis bahwa

pengeluaran pemerintah (G) mempengaruhi Inflasi secara signifikan dan positif.

Hasil Regresi OLS

Langkah pertama adalah melakukan operasi untuk menghasilkan proses uji regresi linear dengan evIEWS dengan meregresikan persamaan pertama yaitu:

$$\text{Log (IHK)} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log (G_KL)} + \beta_2 \text{Log (R)} + \beta_3 \text{Log (BBM)} + \beta_4 \text{Log (KURS)} + \beta_5 \text{Log (GABAH)} + \varepsilon$$

Gambar 2. Hasil Persamaan 1

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(IHK) Method: Least Squares Date: 03/08/22 Time: 23:21 Sample: 2009M01 2021M12 Included observations: 156									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	-2.038842	0.168029	-12.13385	0.0000					
LOG(G_KL)	0.007243	0.004035	1.795060	0.0747					
LOG(R)	-0.168012	0.014259	-11.78268	0.0000					
LOG(BBM)	0.125467	0.033488	3.746592	0.0003					
LOG(KURS)	0.378465	0.030828	12.27680	0.0000					
LOG(GABAH)	0.286060	0.022863	12.51166	0.0000					
R-squared	0.968669	Mean dependent var	4.884532						
Adjusted R-squared	0.967624	S.D. dependent var	0.166012						
S.E. of regression	0.029871	Akaike info criterion	-4.146154						
Sum squared resid	0.133842	Schwarz criterion	-4.028852						
Log likelihood	329.4000	Hannan-Quinn criter.	-4.098511						
F-statistic	927.5089	Durbin-Watson stat	0.401905						
Prob(F-statistic)	0.000000								

Sumber: Output EvIEWS

Pada persamaan kedua Regresi dilakukan dengan memisahkan G kedalam masing-masing jenis belanja menjadi:

$$\text{Log (IHK)} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log (GAJI)} + \beta_2 \text{Log (BARANG)} + \beta_3 \text{Log (MODAL)} + \beta_4 \text{Log (R)} + \beta_5 \text{Log (BBM)} + \beta_6 \text{Log (KURS)} + \beta_7 \text{Log (BERAS)} + \varepsilon$$

Gambar 3. Hasil Persamaan 2

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Dependent Variable: LOG(IHK)									
Method: Least Squares									
Date: 03/08/22 Time: 23:28									
Sample: 2009M01 2021M12									
Included observations: 156									
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.					
C	-2.287666	0.179727	-12.72858	0.0000					
LOG(GAJI)	0.028564	0.008692	3.286153	0.0013					
LOG(BARANG)	0.017143	0.005591	3.066149	0.0026					
LOG(MODAL)	-0.007556	0.002946	-2.564831	0.0113					
LOG(R)	-0.149935	0.013364	-11.21900	0.0000					
LOG(BBM)	0.120368	0.031422	3.830736	0.0002					
LOG(KURS)	0.338514	0.029925	11.31218	0.0000					
LOG(GABAH)	0.267635	0.021635	12.37036	0.0000					
R-squared	0.973935	Mean dependent var	4.884532						
Adjusted R-squared	0.972703	S.D. dependent var	0.166012						
S.E. of regression	0.027428	Akaike info criterion	-4.304555						
Sum squared resid	0.111343	Schwarz criterion	-4.148152						
Log likelihood	343.7553	Hannan-Quinn criter.	-4.241030						
F-statistic	790.0300	Durbin-Watson stat	0.733463						
Prob(F-statistic)	0.000000								

Sumber: Output EvIEWS

Uji T

T parsial ditunjukkan dengan nilai “*t-Statistics*”. Pada persamaan 1 nilai probability variable R, BBM, KURS, GABAH dibawah 0,01 (1%) sementara variable G_KL di bawah 0,1 (10%). Semua variable berpengaruh secara parsial di dalam model terhadap variabel response (IHK). Untuk persamaan 2 nilai probability variable GAJI, BARANG, R, BBM, KURS, GABAH dibawah 0,01 (1%) sementara variable BARANG di bawah 0,05 (5%) sehingga semua variable berpengaruh secara parsial di dalam model terhadap variabel response (IHK).

Koefisien Determinasi Berganda

Nilai koefisien determinasi berganda dalam evIEWS sama seperti halnya dengan aplikasi lainnya, yaitu diberi label R-Squared. Dalam model persamaan 1 nilainya sebesar 0,968669 yang berarti sekumpulan variabel predictor di dalam model dapat menjelaskan variabel response sebesar 96,8669%. Persamaan 2 nilai R-Squared lebih tinggi lagi mencapai 0.973935 yang berarti sekumpulan variabel predictor di dalam model dapat menjelaskan variabel response sebesar 97,3935%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti.

Adjusted R Square

Nilai adjusted R Square artinya nilai R Square yang telah terkoreksi oleh nilai standar error. Dalam persamaan 1, nilai adjusted r square sebesar 0,967624. Sedangkan nilai standar error model regresi 0,029871 ditunjukkan dengan label *S.E. of regression*. Nilai standar error ini lebih kecil daripada nilai standar deviasi variabel response yang ditunjukkan dengan label “S.D.

dependent var" yaitu sebesar 0,166012. Nilai standar error persamaan 2 sebesar 0,027428, lebih kecil daripada nilai standar deviasi variabel response sebesar 0,166012 sehingga dapat diartikan bahwa model regresi 1 dan 2 valid sebagai model predictor.

Uji Simultan

Uji simultan dalam eviews diperlihatkan dengan hasil nilai Uji F yang menunjukkan angka 927,5089 dengan p value sebesar 0,00000 untuk persamaan 1 dimana nilainya < 0,05 atau batas kritis penelitian, sehingga dapat disimpulkan menerima H1. Menerima H1 dalam uji simultan berarti bahwa variabel bebas secara serentak mempengaruhi secara bermakna variabel terikat.

Uji Asumsi Klasik

Tahapan pertama pelaksanaan analisis pada penelitian ini melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Uji Autokorelasi

Untuk menunjukkan "hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu".

DW-Stat (1): 0,401905, DW-Stat (2): 0,733463

$(4 - 0,401905) = 3,598095$, $4 - 0,733463) = 3,266537$

N: 156 K: 6

dl: 1,67265 du: 1,80477

$d > dU$ maka **tidak** terdapat autokorelasi positif

$(4 - d) > dU$ maka **tidak** terdapat autokorelasi negative

Pada analisis regresi persamaan 1 dan 2 tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif sehingga bisa disimpulkan sama sekali tidak terdapat autokorelasi.

Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini ditujukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya berhubungan secara linier atau saling berkorelasi. Model regresi dinyatakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) apabila tidak terdapat multikolinieritas. Multikolinieritas dapat diketahui melalui beberapa pengujian salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung nilai VIF dan Tolerance dari masing-masing variabel bebas.

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan 1

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Variance Inflation Factors									
Date: 03/09/22 Time: 08:28									
Sample: 2009M01 2021M12									
Included observations: 156									
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF						
C	0.028234	4936.218	NA						
LOG(G_KL)	1.63E-05	2086.955	1.543549						
LOG(R)	0.000203	110.4614	1.997209						
LOG(BBM)	0.001121	14726.35	6.824404						
LOG(KURS)	0.000950	14636.47	5.843649						
LOG(GABAH)	0.000523	6341.551	3.226249						

Sumber: Output Eviews

Gambar 5. Hasil Uji Multikolinieritas Persamaan 2

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Variance Inflation Factors									
Date: 03/10/22 Time: 15:44									
Sample: 2009M01 2021M12									
Included observations: 156									
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF						
C	0.032302	6698.059	NA						
LOG(GAJI)	7.56E-05	10445.70	3.187620						
LOG(BARANG)	3.13E-05	4282.519	7.222187						
LOG(MODAL)	8.68E-06	1165.822	5.077410						
LOG(R)	0.000179	115.0830	2.080769						
LOG(BBM)	0.000987	15376.69	7.125779						
LOG(KURS)	0.000895	16357.43	6.530748						
LOG(GABAH)	0.000468	6734.854	3.426341						

Sumber: Output Eviews

Dari table hasil pengujian persamaan 1 dan 2 diatas diketahui bahwa nilai Centered VIF semua variabel bebas kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi.

Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Tujuan uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Gambar 6. Hasil Uji heteroskedastisitas Persamaan 1

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey									
F-statistic	1.372464		Prob. F(5,150)		0.2378				
Obs*R-squared	6.824593		Prob. Chi-Square(5)		0.2340				
Scaled explained SS	8.330105		Prob. Chi-Square(5)		0.1390				

Test Equation:
Dependent Variable: RESID*2
Method: Least Squares
Date: 03/09/22 Time: 08:54
Sample: 2009M01 2021M12
Included observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.006817	0.007821	-0.871626	0.3848
LOG(G_KL)	0.000156	0.000188	0.828503	0.4087
LOG(R)	0.001462	0.000664	2.203212	0.0291
LOG(BBM)	-0.002903	0.001559	-1.862307	0.0645
LOG(KURS)	0.002662	0.001435	1.855613	0.0655
LOG(GABAH)	0.000129	0.001064	0.121328	0.9036
R-squared	0.043747	Mean dependent var	0.000858	
Adjusted R-squared	0.011872	S.D. dependent var	0.001399	
S.E. of regression	0.001390	Akaike info criterion	-10.28091	
Sum squared resid	0.000290	Schwarz criterion	-10.16361	
Log likelihood	807.9110	Hannan-Quinn criter.	-10.23327	
F-statistic	1.372464	Durbin-Watson stat	0.630366	
Prob(F-statistic)	0.237795			

Sumber: Output Eviews

Gambar 7. Hasil Uji heteroskedastisitas Persamaan 2

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Estimate	Forecast	Stats	Resids
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey									
F-statistic	1.101414		Prob. F(7,148)		0.3653				
Obs*R-squared	7.724260		Prob. Chi-Square(7)		0.3575				
Scaled explained SS	8.907847		Prob. Chi-Square(7)		0.2593				

Test Equation:
Dependent Variable: RESID*2
Method: Least Squares
Date: 03/10/22 Time: 15:51
Sample: 2009M01 2021M12
Included observations: 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008743	0.007494	1.166747	0.2452
LOG(GAJI)	-0.000574	0.000362	-1.584628	0.1152
LOG(BARANG)	0.000278	0.000233	1.191623	0.2353
LOG(MODAL)	-9.57E-05	0.000123	-0.778939	0.4373
LOG(R)	0.000586	0.000557	1.051243	0.2949
LOG(BBM)	-0.001934	0.001310	-1.476267	0.1420
LOG(KURS)	0.000986	0.001248	0.790450	0.4305
LOG(GABAH)	0.001029	0.000902	1.141186	0.2556
R-squared	0.049514	Mean dependent var	0.000714	
Adjusted R-squared	0.004559	S.D. dependent var	0.001146	
S.E. of regression	0.001144	Akaike info criterion	-10.65933	
Sum squared resid	0.000194	Schwarz criterion	-10.50293	
Log likelihood	839.4279	Hannan-Quinn criter.	-10.59581	
F-statistic	1.101414	Durbin-Watson stat	1.086981	
Prob(F-statistic)	0.365257			

Sumber: Output Eviews

Dari hasil pengujian didapatkan nilai nilai p value yang ditunjukkan dengan nilai Prob. chi square (5) pada Obs*R-Squared yaitu sebesar 0,2340 untuk persamaan 1 dan 0,3575 untuk persamaan 2. Oleh karena nilai p value kedua persamaan > 0,05 maka terima H0 atau ang berarti model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi non heteroskedastisitas.

Interpretasi Model Persamaan 1 dan 2

1. $\text{Log (IHK)} = -2,0388 + 0,0072 \text{ Log (G_KL)} - 0,1680 \text{ Log (R)} + 0,1254 \text{ Log (BBM)} + 0,3784 \text{ Log (KURS)} + 0,2860 \text{ Log (GABAH)}$

-12,1338***	1,795*	-11,7826***
3,7465***	12,2768***	12,5116***
2. $\text{Log (IHK)} = -2,2876 + 0,0285 \text{ Log (GAJI)} + 0,0171 \text{ Log (BARANG)} - 0,0075 \text{ Log (MODAL)} - 0,1499 \text{ Log (R)} + 0,1203 \text{ Log (BBM)} + 0,3385 \text{ Log (KURS)} + 0,2676 \text{ Log (GABAH)}$

-12,7285***	3,2861***	3,0661***
-2,5648***	-11,2190***	3,8307***
11,3121***	12,3703***	

Pada persamaan 1, semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun serempak terhadap IHK. Variabel G_KL, GABAH, BBM, KURS memiliki koefisien positif yang artinya peningkatan pada variabel tersebut akan berdampak pula pada kenaikan inflasi. Kenaikan KURS dapat diartikan sebagai pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US\$. Variabel R memiliki koefisien negatif karena kenaikan tingkat suku bunga akan mengurangi jumlah uang beredar sehingga turut menekan inflasi.

Hasil untuk persamaan 2 juga tidak jauh berbeda. Belanja pegawai (gaji) dan barang memiliki koefisien positif, sedangkan belanja modal memiliki

koefisien negatif. Berbeda dengan belanja lainnya yang bersifat konsumtif, belanja modal juga berperan sebagai investasi pemerintah yang akan mendukung peningkatan factor produksi sehingga berdampak peningkatan supply.

Self Refocussing

Self refocussing adalah revisi pemotongan anggaran oleh satker melalui Kanwil DJPb atas sisa pagu yang tidak terserap namun output telah tercapai 100% untuk kemudian dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk program penanganan Covid-19 serta PEN ataupun program prioritas lainnya. *Self refocussing* disini merupakan alternatif lain dalam proses penganggaran dan tentunya tidak menggantikan *refocussing* anggaran yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat). Gambar 8: Latar Belakang Perlunya *Self Refocussing*



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Sulut

Self refocussing tidak hanya relevan dijalankan dalam situasi Pandemi Covid-19, namun bisa diterapkan dalam segala kondisi mengingat akan selalu ada pekerjaan atau program penting Pemerintah yang tidak atau belum bisa dilaksanakan karena belum mendapatkan alokasi anggaran. Untuk mewujudkan *self refocussing*, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan perlu segera menyusun

perubahan peraturan terkait revisi DIPA untuk kemudian disosialisasikan ke seluruh Satker oleh masing – masing Kanwil DJPb dan KPPN. Selain itu juga perlu dihindari adanya himbauan dari kantor pusat atau eselon-1 untuk melakukan optimalisasi atas sisa anggaran yang tidak terserap untuk mengejar realisasi setinggi mungkin. Sebagai gantinya, eselon-1 masing – masing Satker harus turut menghimbau atau mewajibkan seluruh Satker untuk melakukan self refocussing atas sisa pagu yang tidak terserap

KESIMPULAN

1. Selama kurun waktu 2009 - 2021, belanja kementerian negara/lembaga telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang hampir sama persis dimana sangat rendah di bulan Januari dan Februari kemudian perlahan lahan meningkat hingga bulan Juli selanjutnya sedikit mengalami kontraksi pada bulan Agustus kemudian terus mengalami peningkatan hingga melonjak tajam pada bulan November dan Desember. Pola demikian juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi pada pemerintah pusat. Apabila kondisi tersebut masih terus berlanjut, hal ini akan mengganggu rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum, dan tentunya berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada bulan Desember.
2. Dari hasil dekomposisi variabel inflasi (I) dan variabel G (Government Expenditure) dapat dilihat beberapa

kemiripan indeks musiman pada kedua variabel dimana relative moderat pada bulan Februari, Juli, Agustus, dan Oktober kemudian melonjak tajam dan mencapai puncaknya pada bulan November hingga Desember. Selama 13 tahun ini puncak tertinggi belanja APBN terjadi pada bulan Desember dimana hampir semua instansi pemerintah berpacu untuk menghabiskan sisa anggaran (meningkatkan penyerapan anggaran) sehingga pengeluaran pemerintah sangat tinggi dimana indeks musiman mencapai 2.7 atau 8,85 kali dari belanja APBN di bulan Januari yang memiliki indeks musiman terendah.

3. Dari hasil regresi dapat diinterpretasikan bahwa realisasi belanja APBN Sulawesi Utara berdampak secara signifikan dan positif terhadap variabel terikat (inflasi)
4. Hasil regresi persamaan dapat diinterpretasikan bahwa belanja pegawai dan barang lingkup Sulawesi Utara berdampak secara signifikan dan positif terhadap variabel terikat (inflasi), sedangkan belanja modal memiliki dampak signifikan dan negative terhadap inflasi.

SARAN

1. Mengupayakan Penyerapan anggaran yang lebih merata/smooth tiap bulannya dan menghindari adanya shock G secara berlebihan seperti yang biasa terjadi tiap tahun pada bulan Juni dan Desember untuk meminimalisir dampak terhadap kenaikan inflasi. Hal tersebut

antara lain dapat diwujudkan melalui penegasan pemberlakuan IKPA untuk indicator realisasi belanja serta halaman III DIPA bagi seluruh satuan kerja.

2. *Self refocussing* perlu dijalankan untuk menghindari belanja untuk sekedar mengejar realisasi setinggi mungkin pada akhir tahun anggaran.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja barang dan belanja pegawai berdampak secara positif dan signifikan terhadap inflasi dan dalam perkembangannya selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sehingga harus dikurangi atau setidaknya harus ditekan agar tidak terus meningkat antara lain melalui rasionalisasi jumlah PNS, mengurangi perjalanan dinas yang tidak penting, penertiban honor honor yang tidak perlu serta efisiensi dalam belanja barang.
4. Memperbanyak komposisi belanja untuk belanja modal (akun 53) khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang belanja modal pemerintah pusat berdampak secara signifikan dan negatif terhadap inflasi meskipun dengan koefisien yang sangat kecil, namun dalam perkembangannya belanja tersebut hanya mengalami peningkatan yang tidak signifikan atau setara dengan jenis belanja lainnya dari tahun ke tahun.
5. Pemerintah Daerah diharapkan secara bertahap mampu memperbaiki komposisi APBD dengan mengurangi belanja administrasi (belanja pegawai dan

barang) serta meningkatkan belanja modal terutama untuk infrastruktur. Bagaimanapun nilai belanja APBD terus mengalami tren peningkatan dan tentunya juga akan berdampak pada perkembangan inflasi di Sulawesi Utara.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Melihat tren belanja APBD khususnya dana transfer dari Pemerintah Pusat, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan juga untuk melakukan penelitian sejenis namun dengan memasukkan unsur belanja yang bersumber dari APBD.

REFERENSI

Aghevli, Bijan B., and Mohsin S. Khan, "Government Deficits and the Inflationary Process in Developing Countries " *Staff Papers (International Monetary Fund)*, Vol. 25, No. 3 (Sep., 1978), pp. 383-416.

Andrianus, F. dan Niko A., (2006). "Analisa Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 1997:3-2005:2", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 11 No. 2, Agustus 2006, Hal 173-186.

Anipa, Seth, Felix Kaluma, and Elizabeth Muggeridge (1999), "*Case Study on MTEF in Malawi and Ghana*" Consulting Africa Ltd, Juni 1999.

Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). "Ekonometrika : Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan EvIEWS". Penerbit Erlangga. Jakarta.

Bank Indonesia. (2007). "Analisis Perilaku Inflasi di Propinsi Jawa Tengah". Penerbit Bank Indonesia Semarang.

Carsidiawan, Didi. (2008). "Mengungkap Penyebab Lambatnya Penyerapan Anggaran Belanja".

Gujarati, D. N. (1995). "Basic econometric". *International edition*. (3thed). United States Military Academy West Point. McGraw-Hill, Inc.

Habibullah, Muzafar Shah. (2011). "Budget Deficits and Inflation in Thirteen Asian Developing Countries", *International Journal of Business and Social Science*.

Herriyanto, Hendris. (2012). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta". Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi.Universitas Indonesia.

Mankiw, N. G. (2006). "Teori makro ekonomi. (6thed)". Alih bahasa Imam Nurmawan. Editor Yati Sumiharti. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Masri, Marius. 2010. Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Periode 2001 – 2008). Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi. Universitas Dipongoro.

Mulyono, Sri. (1991). "Statistika Untuk Ekonomi". Penerbit LP-FEUI. Jakarta.

Nguyen, Tai Dang. 2014. "Impact of government spending on inflation in Asian emerging economies: evidence from India, Vietnam, and Indonesia".

Sembiring, Riswanto. (2010). "Bauran Kebijakan Fiskal Moneter Di Indonesia Periode 1997Q3 – 2009Q4". Tesis.

Jakarta: Fakultas Ekonomi.Universitas Indonesia.

Surjaningsih, Ndari. dkk. (2012). "The Impact of Fiscal Policy on The Output and Inflation", *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, April 2012.

Yustika, Ahmad Erani. (2012). "Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar". Malang: Bayumedia Publishing.